



## IMPLEMENTASI E-BUDGETING DAN DAMPAKNYA TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI KEUANGAN DISEKTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG

Fanesya Islami Zahra<sup>1\*</sup>, Syifa Shafira<sup>2</sup>, Abdal<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

\*Penulis Korespondensi: [fanesya.iz20@gmail.com](mailto:fanesya.iz20@gmail.com), [syahrialadjah212@gmail.com](mailto:syahrialadjah212@gmail.com), [abdal@uinsgd.ac.id](mailto:abdal@uinsgd.ac.id)

**Abstract.** *The implementation of e-Budgeting in Bandung Regency has had a significant positive impact on improving transparency, accountability, and the effectiveness of local financial management. This digital system allows the public to easily access budget information through official government platforms, thereby strengthening the oversight role of both the public and formal institutions. Additionally, data integration within e-Budgeting improves the accuracy of budget preparation, accelerates synchronization among local government agencies, and supports the implementation of audit trails as internal control mechanisms. From a good governance perspective, e-Budgeting serves as a crucial foundation for strengthening performance-based governance that is more open and responsive. Nevertheless, challenges such as low digital literacy among government officials, limited IT infrastructure, and the public's limited understanding of budget information remain obstacles that must be addressed. Efforts to enhance human resource capacity and improve technological support are key to optimizing the system in the future. Overall, the implementation of e-Budgeting in Bandung Regency has brought about a transformation in budget management toward a system that is more transparent, efficient, and integrity-driven.*

**Keywords:** *e-Budgeting, budget transparency, budgeting effectiveness, good governance, Bandung Regency*

**Abstrak.** Implementasi e-Budgeting di Kabupaten Bandung menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem digital ini memungkinkan publik mengakses informasi anggaran secara mudah melalui platform resmi pemerintah sehingga memperkuat peran pengawasan oleh masyarakat maupun lembaga formal. Selain itu, integrasi data dalam e-Budgeting meningkatkan akurasi penyusunan anggaran, mempercepat sinkronisasi antar-perangkat daerah, serta mendukung penerapan audit trail sebagai instrumen pengendalian internal. Dari aspek good governance, e-Budgeting menjadi fondasi penting bagi penguatan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja yang lebih terbuka dan responsif. Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi digital aparatur, keterbatasan infrastruktur TI, serta minimnya pemahaman publik terhadap informasi anggaran masih menjadi hambatan yang harus diatasi. Upaya peningkatan kapasitas SDM dan perbaikan dukungan teknologi menjadi kunci optimalisasi sistem di masa mendatang. Secara keseluruhan, penerapan e-Budgeting di Kabupaten Bandung telah membawa transformasi tata kelola anggaran menuju sistem yang lebih transparan, efisien, dan berintegritas.

**Kata Kunci:** e-Budgeting, transparansi anggaran, efektivitas penganggaran, good governance, Kabupaten Bandung

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam era digital, transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen krusial untuk tata kelola keuangan yang efektif, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta. Semakin banyak lembaga yang mengadopsi sistem anggaran berbasis teknologi. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi, mencegah penyalahgunaan dana, dan memastikan

bahwa informasi keuangan dapat diakses secara terbuka oleh publik dan para pemangku kepentingan. Sistem digital ini secara spesifik dirancang untuk memperbaiki mutu perencanaan, alokasi, dan pengawasan anggaran.

Reformasi tata kelola keuangan publik di Indonesia terus mengalami dinamika, salah satunya melalui digitalisasi sistem penganggaran di tingkat pemerintah daerah. Penggunaan sistem elektronik seperti e-Budgeting telah diidentifikasi sebagai salah satu instrumen penting untuk memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik (Andhayani, 2023).

Di konteks pemerintah daerah, implementasi e-Budgeting menjadi penting karena anggaran daerah (APBD) merupakan instrumen utama bagi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Apabila proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan dilakukan secara manual atau tertutup, maka potensi maladministrasi dan kurangnya keterbukaan informasi bisa muncul (Rahma & Rani, 2023).

Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana proses implementasi e-Budgeting dilaksanakan di Kabupaten Bandung serta bagaimana sistem tersebut berpengaruh terhadap keterbukaan informasi keuangan daerah. Meskipun e-Budgeting telah diterapkan di berbagai pemerintah daerah sebagai bentuk inovasi digital dalam pengelolaan anggaran, tingkat efektivitasnya dalam meningkatkan transparansi masih bervariasi antar wilayah. Dalam konteks Kabupaten Bandung, diperlukan kajian mendalam untuk memahami sejauh mana sistem ini berfungsi sebagai sarana keterbukaan publik terhadap informasi keuangan, termasuk bagaimana publik dapat mengakses data anggaran dan pelaporan keuangan secara terbuka.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan e-Budgeting di Pemerintah Kabupaten Bandung serta menilai dampaknya terhadap keterbukaan informasi keuangan daerah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sistem tersebut, baik dari aspek teknis, kelembagaan, maupun kebijakan. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sejauh mana e-Budgeting dapat berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di tingkat daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam

memperkuat sistem pengelolaan keuangan berbasis digital serta menjadi referensi akademis bagi penelitian lanjutan di bidang tata kelola keuangan publik dan digitalisasi pemerintahan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

E-Budgeting merupakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi proses penyusunan serta pelaksanaan anggaran pemerintah. Sistem ini memungkinkan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dilakukan secara digital dan terintegrasi antar perangkat daerah (Andhayani, 2023). Menurut Fikriyah dan Tirmizi (2022), e-Budgeting tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai instrumen reformasi birokrasi yang mendorong keterbukaan informasi publik dan pengawasan berbasis data (Fikriyah & Trisnainingsih, 2022).

Secara umum, implementasi e-Budgeting di Indonesia mulai berkembang sejak diterbitkannya kebijakan digitalisasi sistem keuangan daerah yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh Kementerian Dalam Negeri. SIPD berfungsi sebagai platform utama dalam menyusun dan mengelola anggaran daerah secara elektronik (Kemendagri, 2023). Melalui sistem ini, setiap tahapan penganggaran mulai dari perencanaan program, penyusunan RKA hingga penetapan APBD dapat ditelusuri secara digital, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan memperkecil peluang manipulasi data (Gunawan, 2016).

Keterbukaan informasi keuangan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan ini mengacu pada sejauh mana masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kebijakan anggaran, penggunaan dana publik, serta hasil pelaksanaannya (Internasional Budget Partnership, 2023). Menurut Gunawan (2022), keterbukaan informasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan publikasi laporan keuangan, tetapi juga kemudahan masyarakat dalam memperoleh data anggaran secara tepat waktu, lengkap, dan mudah dipahami (Gunawan, 2016).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Budgeting memiliki korelasi positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Rahma dan

Rani (2023) menemukan bahwa penggunaan e-Budgeting di Kota Surakarta mempermudah publik untuk menelusuri proses alokasi anggaran dan mencegah potensi tumpang tindih kegiatan (Rahma & Rani, 2023). Hasil serupa juga ditemukan oleh Arini (2022) di Kota Surabaya, di mana sistem e-Budgeting membantu mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan efisiensi pelaporan (Arini & Nasehati, 2022).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi sistem e-Budgeting dan dampaknya terhadap keterbukaan informasi keuangan di Kabupaten Bandung. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena secara kontekstual dan mendalam, bukan pada pengukuran kuantitatif. Menurut Creswell (2021), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, pandangan, dan interpretasi terhadap suatu fenomena sosial berdasarkan data tekstual dan naratif yang diperoleh dari berbagai sumber (Rijal Fadli, 2021).

Metode studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber informasi yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, artikel akademik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan digitalisasi keuangan daerah, e-Budgeting, dan transparansi keuangan publik. Sumber literatur yang dianalisis mencakup publikasi antara tahun 2019 hingga 2025, baik dari sumber nasional maupun internasional.

Prosedur penelitian ini meliputi tiga tahap utama, yaitu: (1) pengumpulan literatur dari database akademik seperti Google Scholar, DOAJ, dan portal jurnal nasional; (2) evaluasi dan seleksi literatur berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber; serta (3) analisis isi (*content analysis*) untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antara penerapan e-Budgeting dengan keterbukaan informasi keuangan daerah. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan cara mengelompokkan temuan dari berbagai literatur, membandingkannya, dan menarik kesimpulan konseptual mengenai efektivitas sistem e-Budgeting di Kabupaten Bandung dalam mewujudkan transparansi keuangan daerah.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi e-Budgeting di Kabupaten Bandung telah menunjukkan dampak yang signifikan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sebelum diterapkannya sistem digital dalam proses penganggaran, pemerintah daerah cenderung menggunakan mekanisme manual yang membutuhkan waktu panjang, rawan terhadap inkonsistensi data, serta sulit diakses oleh masyarakat umum (Nasution & Rizqy Ramadhan, 2019). Prosedur permintaan informasi keuangan yang berbelit membuat masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan secara optimal. Melalui adopsi e-Budgeting, proses tersebut berubah secara fundamental menjadi lebih terbuka, cepat, dan mudah untuk ditelusuri (Rahma & Rani, 2023).

Pemerintah Kabupaten Bandung kini menyediakan berbagai dokumen keuangan daerah seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), serta laporan realisasi anggaran melalui platform digital seperti SIPD dan portal informasi BPKAD Kabupaten Bandung. Dengan kemudahan tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa harus melewati prosedur birokrasi formal, sehingga meningkatkan keterlibatan publik dalam pengawasan belanja daerah.

Selain peningkatan transparansi, e-Budgeting juga berkontribusi besar terhadap efektivitas dan efisiensi penyusunan anggaran. Integrasi data dalam sistem digital memungkinkan proses input anggaran dilakukan secara realtime, sehingga mengurangi potensi duplikasi anggaran maupun kesalahan hitung yang sering terjadi pada metode manual. Setiap perubahan data pada sistem dapat terekam jejaknya secara otomatis melalui audit trail, sehingga proses pengendalian internal menjadi lebih mudah dilakukan. Hal ini berdampak pada peningkatan akurasi dan integritas data anggaran yang disajikan.

Dengan adanya mekanisme verifikasi digital berlapis, sistem membantu mencegah penyimpangan anggaran sejak tahap perencanaan, yang sebelumnya sulit dikendalikan ketika dokumen hanya tersedia dalam bentuk fisik. Selain itu, digitalisasi proses anggaran juga mempercepat sinkronisasi data antar-perangkat daerah yang sebelumnya terkendala perbedaan format dokumen dan keterlambatan koordinasi (Subiyanto et al., 2023).

Dari perspektif pengawasan keuangan daerah, penerapan e-Budgeting memperkuat fungsi kontrol oleh berbagai pemangku kepentingan. Inspektorat Daerah kini dapat melakukan audit internal berbasis data digital yang lebih terstruktur dan lengkap. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memperoleh akses yang lebih mudah untuk meninjau rencana dan pelaksanaan anggaran secara menyeluruh. Lembaga audit eksternal seperti BPK juga mendapatkan dukungan data yang lebih valid untuk menilai tingkat kepatuhan dan kinerja pemerintah daerah. Yang tak kalah penting, masyarakat turut diberi ruang untuk melakukan pengawasan melalui keterbukaan informasi publik. Dengan kata lain, pemerintah daerah tidak lagi hanya diawasi oleh lembaga formal, melainkan juga oleh publik sebagai penerima manfaat anggaran.

Peningkatan akses informasi ini memperkecil peluang terjadinya praktik korupsi, seperti pengadaan fiktif, mark-up anggaran, atau alokasi dana yang tidak sesuai peruntukan, karena setiap penggunaan anggaran dapat dibandingkan dengan data perencanaan yang telah dipublikasikan sebelumnya (Rahma & Rani, 2023).

Secara konseptual, praktik tersebut mencerminkan penguatan prinsip good governance, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pemerintah dituntut lebih bertanggung jawab dalam setiap keputusan penggunaan anggaran karena semua data dapat dimonitor secara terus-menerus oleh masyarakat. Selain itu, e-Budgeting menjadi pondasi bagi penerapan anggaran berbasis kinerja yang menghubungkan secara jelas alokasi dana dengan output serta outcome pembangunan. Perangkat daerah tidak hanya harus menganggarkan program, tetapi juga menyertakan indikator hasil yang terukur sehingga kinerjanya dapat dievaluasi secara objektif melalui perbandingan antara rencana dan realisasi anggaran. Dengan demikian, implementasi e-Budgeting bukan sekadar digitalisasi prosedural, melainkan perubahan sistemik yang menghasilkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil.

Walaupun dampak positifnya sangat kuat, penerapan e-Budgeting di Kabupaten Bandung juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian. Kesiapan sumber daya manusia masih menjadi persoalan utama karena tidak semua aparatur memiliki kemampuan literasi digital yang memadai untuk mengoperasikan sistem secara optimal. Hambatan ini terkadang menyebabkan keterlambatan input data atau kesalahan teknis yang berdampak pada kualitas informasi yang ditampilkan. Di sisi lain,

infrastruktur teknologi informasi di beberapa perangkat daerah belum sepenuhnya stabil, sehingga ketika jaringan mengalami gangguan, pembaruan data anggaran pun terhambat. Selain itu, meskipun informasi keuangan sudah dibuka secara luas, sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup untuk menelaah dan mengawasi dokumen anggaran dengan efektif. Akses informasi yang tersedia belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemampuan pemanfaatan informasi oleh publik. Tantangan lainnya adalah ketergantungan pada sistem pusat seperti SIPD yang masih mengalami pembaruan berkala dan pembatasan tertentu yang membuat pemerintah daerah belum sepenuhnya leluasa dalam melakukan inovasi teknis di dalam sistem (Arini & Nasehati, 2022).

Secara keseluruhan, hasil kajian ini menunjukkan bahwa implementasi e-Budgeting telah memberikan dampak substansial terhadap peningkatan keterbukaan informasi anggaran, efektivitas proses penganggaran, serta penguatan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bandung (Gamayuni & Hendrawaty Ernie, 2020). Meskipun masih menghadapi kendala teknis dan non-teknis yang perlu diperbaiki melalui peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur digital, e-Budgeting tetap menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan usaha pengembangan yang berkelanjutan dan perbaikan aspek pendukungnya, Kabupaten Bandung berpotensi menjadi daerah yang memberikan contoh penerapan tata kelola keuangan berbasis digital yang unggul dan berintegritas di tingkat nasional.

## **5. KESIMPULAN**

Implementasi e-Budgeting di Kabupaten Bandung telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Sistem ini tidak hanya mempermudah akses publik terhadap dokumen keuangan seperti APBD, RKPD, dan laporan realisasi anggaran, tetapi juga memperkuat proses pengawasan oleh inspektorat, DPRD, BPK, hingga masyarakat. Integrasi digital turut meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan anggaran melalui input data yang realtime, audit trail otomatis, serta sinkronisasi antar-perangkat daerah yang lebih baik. Dengan demikian, penerapan e-Budgeting menjadi wujud nyata penguatan prinsip good governance, terutama dalam aspek transparansi, keterbukaan informasi, dan partisipasi publik.

Namun, penerapan sistem ini masih dihadapkan pada tantangan seperti literasi digital aparatur yang belum merata, infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya memadai, serta rendahnya kemampuan sebagian masyarakat dalam memanfaatkan data keuangan daerah secara optimal. Di samping itu, ketergantungan pada sistem pusat seperti SIPD masih membatasi fleksibilitas teknis pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas SDM dan perbaikan infrastruktur digital menjadi kebutuhan penting agar manfaat e-Budgeting dapat dirasakan secara maksimal. Secara keseluruhan, e-Budgeting telah menjadi fondasi strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, berorientasi hasil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Andhayani, A. (2023). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: e-Budgeting untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2). <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.005>
- Arini, S., & Nasehati, S. (2022). ANALISIS IMPLEMENTASI E-BUDGETING DALAM MENDUKUNG TRANSPARANSI PADA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA. *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN*, 2(2), 134–140. <http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/IMK>
- Fikriyah, T. M., & Trisnarningsih, S. (2022). STUDI LITERATUR ELECTRONIC BUDGETINGSEBAGAI PENINGKATAN TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD). *SENAPAN*.
- Gamayuni, R. R., & Hendrawaty Ernie. (2020). E-Planning, E-Budgeting and the Quality of Government Institution Performance Accountability System in Indonesia. *Talent Development & Excellence*.
- Gunawan, D. R. (2016). PENERAPAN SISTEM E-BUDGETING TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PUBLIK (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA). *Jurnal Akuntansni*, 72–102. <http://journal.unesa.ac.id/index.php/aj>
- Internasional Budget Partnership. (2023). Open Budget Survey 2023. Internasional Budget Partnership. <https://internationalbudget.org/open-budget-survey/country-results/2023/indonesia?>
- Nasution, D. A. D., & Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Implementasi E-Budgeting Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 669. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p26>
- Rahma, A. N., & Rani, U. (2023). *Peran E-Budgeting Untuk Mendukung Transparansi Anggaran Pada Pemerintah Kota Surakarta (Adhisa Nurafia Rahma; Utpala Rani)*.

**IMPLEMENTASI E-BUDGETING DAN DAMPAKNYA TERHADAP KETERBUKAAN  
INFORMASI KEUANGAN DISEKTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG**

- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Subiyanto, B., Saleh Tobing, K. L., Digdowiseiso, K., & Abd Majid, N. (2023). THE DETERMINANTS OF E-BUDGETING IMPLEMENTATION IN INDONESIA: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *Journal of Accounting Research, Utility Finance and Digital Assets*. <https://jaruda.org>